



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	: 13 (tiga belas)
Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: II
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Utama Karya (Persero).
Hari, Tanggal	: Rabu, 16 November 2022
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: M Sarmuji, S.E, M.Si / Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pembahasan mengenai Pendalaman PMN Tunai TA 2022.
Hadir	: 1. 31 Orang dari 55 Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT Utama Karya (Persero), Saudara Budi Harto Beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Utama Karya (Persero) pada pukul 10.20 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 16 November 2022, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M Sarmuji, S.E, M.Si

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI memahami dan menerima penjelasan dari PT Hutama Karya (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun 2022 sebesar Rp. 23.850.000.000.000,- (*Dua Puluh Tiga Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah*) untuk penyelesaian beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
 - b. Tambahan Penyertaan Modal Negara Tunai Tahun 2022 sebesar Rp. 7.500.000.000.000,- (*Tujuh Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) yang berasal dari cadangan investasi Tahun 2022 untuk penyelesaian beberapa ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Hutama Karya (Persero) untuk memastikan bahwa penyelesaian proyek Jalan Tol Trans Sumatera yang dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara dapat terselesaikan tepat waktu sesuai dengan *timeline* yang telah dipaparkan.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Hutama Karya (Persero) untuk melibatkan para pelaku usaha setempat khususnya UMKM dalam pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi setempat.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN RI, Kementerian Keuangan RI, serta Kementerian Hukum dan HAM RI agar Penetapan Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden RI dan pencairan dana PMN Tunai Tahun 2022 dapat segera terlaksana.
5. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Hutama Karya (Persero) untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.53 WIB.

**DIREKTUR UTAMA
PT HUTAMA KARYA (PERSERO),**

Ttd.

BUDI HARTO

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

Ttd.

**M SARMUJI, S.E, M.Si
A-318**